

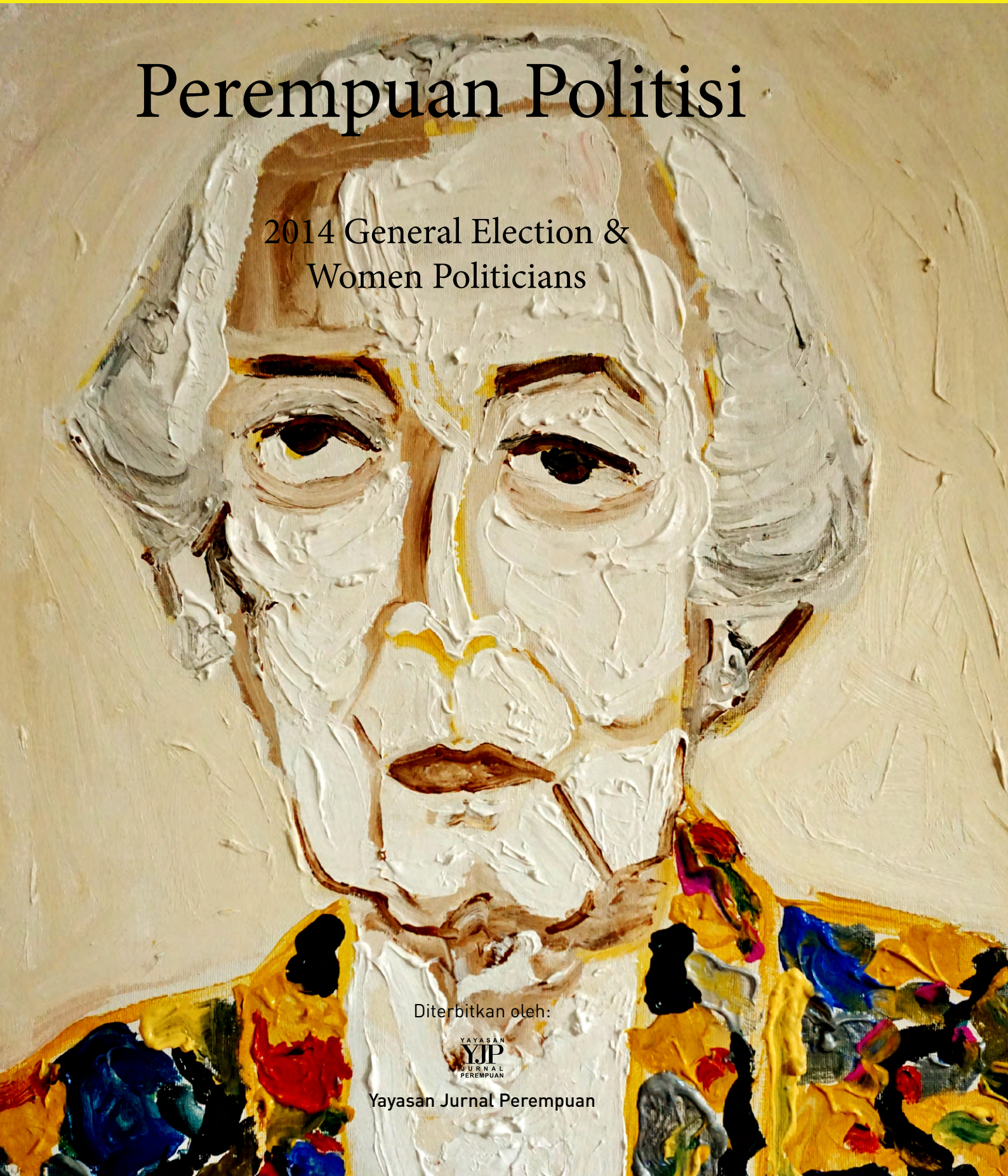
Perempuan Politisi

2014 General Election &
Women Politicians

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

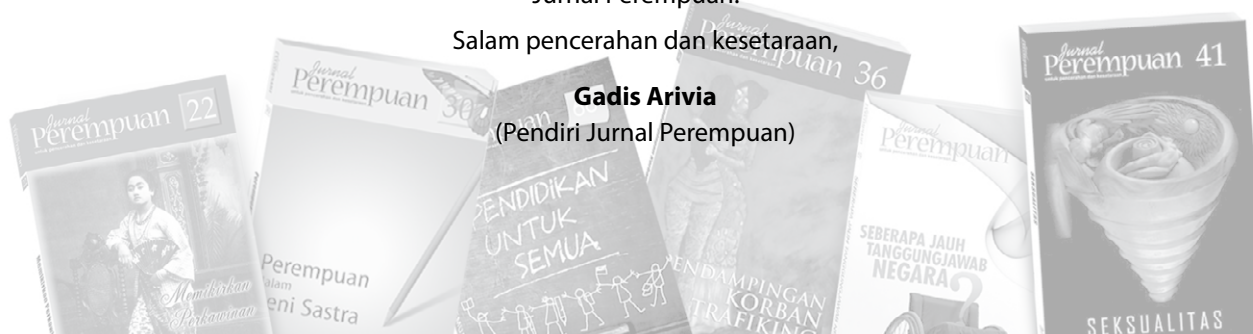
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

| | |
|---|---------|
| Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi" | iii-iv |
| Artikel / Articles | |
| • Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i> | 81-91 |
| <i>Baiq L.S.W. Wardhani</i> | |
| • Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i> | 93-101 |
| <i>Partini</i> | |
| • Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i> | 103-115 |
| <i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i> | |
| • Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i> | 117-127 |
| <i>Aditya Perdana</i> | |
| • Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i> | 129-143 |
| <i>Nuri Soeseno</i> | |
| • Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i> | 145-151 |
| <i>Any Sundari</i> | |
| • Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i> | 153-160 |
| <i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i> | |
| Wawancara / Interview | |
| • Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i> | 161-164 |
| <i>Dewi Candraningrum</i> | |
| Kata dan Makna / Words and Meanings | 165-166 |
| Profil / Profile | |
| • Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja? | 167-170 |
| <i>Mariana Amiruddin</i> | |
| Resensi Buku/ Book Review | |
| • Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i> | 171-173 |
| <i>Astuti Parengkuh</i> | |

“Kursi”

Pemimpin Redaksi melukis “Kursi” untuk perempuan dalam sampul wajah *Jurnal Perempuan* Edisi 81 kali ini dengan akrilik di atas kanvas berukuran 60x90 cm. Transformasi kata “kursi” sebagai sebuah metafora memiliki makna penting bagi perempuan apabila dikaitkan dengan “kekuasaan”. Rata-rata perempuan menempati “kursi” parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18,2 persen. Data KPU 2014 menunjukkan hanya sekitar 747 perempuan dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya 1718 perempuan bukan merupakan kader partai (merupakan agregasi dengan latar belakang pengusaha, swasta, profesional, artis, selebriti, aktivis, dinasti politik, dan lain-lain). Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada Maret 2013 ini diungkapkan pelbagai penelitian bagaimana strategi

kenegaraan banyak menemu kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep kewarganegaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual—dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Dus, jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarga-negaraannya oleh negara. Dus, jamak pula apabila peradaban kita minim perempuan politisi.

Membongkar konsep kewarganegaraan yang maskulin membutuhkan analisis yang kompleks dan tidak parsial. *Stereotype* dan ketidaksetaraan telah berkembang dan tumbuh menjadi sistem tersendiri. Inisiatif untuk membongkar ini adalah jangka panjang dan memakan waktu lebih dari beberapa dekade. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini: 1) merujuk pada komitmen internasional; 2) representasi kuota dan langkah afirmatif bagi kuota perempuan di par-lemen dan legislatif; 3) reformasi legislatif dalam menjaga kesetaraan hak antara laki-laki, perempuan dan minoritas seksual;

4) aksi afirmasi untuk mengatasi dis-paritas gender dalam politik, terutama partai politik. Karena partai politik adalah penjaga gawang demokrasi, maka perlu diusahakan ketiga perihal berikut dalam partai politik: 4a) kuota voluntir untuk partisipasi perempuan dalam struktur partai politik; 4b) *Outreach* partai politik pada pemilih perempuan; 4c) memperkuat dialog publik dan dialog antar dan inter-partai. 5) Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi

politik, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut: 5a) kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan; 5b) monitoring gender pada arus politik: bagaimana kualitas laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warga-negara; 5c) mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi; 5d) bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik; 5e) mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media. Dan lain-lain. Kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil. **(Dewi Candraningrum)**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Baiq L.S.W. Wardhani, FISIP Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Mulyorejo, Jawa Timur 60115. Telp. : (031) 5914042

Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma *Inclusive Citizenship*

Status of Women as Citizen in the Paradigm of *Inclusive Citizenship*

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 81-91, 39 daftar pustaka.

Political arena has witnessed the masculinization of women's role in the public. The tendency to give the public to men has made women unable to express their ideas in full engagement as equal citizen. Involving back women into the discourse of the state is a form of defeating the myth that women are irresponsible citizens. Irresponsibility of women is the reversal effect of political exclusion of female's voices under the regimentation of male-based polity. This paper will investigate the status of women specifically under the paradigm of active and inclusive citizenship.

Keywords: citizenship status, women, inclusive citizenship, Africa, Indonesia.

Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisional relasi gender. "Ketidakbertanggungjawaban" perempuan dalam ruang publik merupakan konsekuensi dari tidak diakuiannya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem patriarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif.

Kata kunci: status kewarganegaraan, perempuan, kewarganegaraan inklusif, Afrika, Indonesia.

Partini, FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia. Telepon: +62 (0)274 548510 (Hunting), Fax: +62 274 563212

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia

Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 93-101, 14 daftar pustaka.

Women's participation in politics is the manifestation of the citizenship right fulfillment. Women as well as vulnerable groups as citizens have the right to improve their existence in politics. The rights that attach to women as citizens hopefully can make them not only as the vote-getter or political parties' participants but also as those being elected and exercise policy. Politic is genderless but politic system is constructed mostly by men. And women are lacking confidence within this culture of politic. It then deteriorates the stigma that women are unable and having no capacity to compete with men. Although women are legal citizens but the culture of politic is neither friendly to women nor conducive to feminine traits. The electoral process in citizenships system hopefully does not only create the man-represented view, but also a transformation process between the political party and the women platform.

Keywords: political participation, citizenship, discrimination.

Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai Warga Negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol, sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain. Politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik dikonstruksi secara maskulin. Ini menguatkan stigma bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki. Budaya politik belum kondusif, belum ramah perempuan meski perempuan sebagai warga negara yang sah. Proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana keterwakilan, tetapi sebuah proses transformasi antara parpol dan perempuan.

Kata kunci: partisipasi politik, kewarganegaraan, diskriminasi.

Shelly Adelina & Ani Soetjipto, Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia. Gedung Rektorat UI, Lantai IV, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya no. 4 Jakarta 10430, telp: 021-3160788, 021-3907407, faks. 021-3907407

Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender

Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 103-115, 4 tabel, 21 daftar pustaka.

Analysis of the gender strategy in the three largest political parties which dominate the legislative period 2009-2014, namely the Democratic Party, the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows several findings that can be reflected to travel to face election. First, third parties accounted for the most number of women seats in the national parliament. Second, as the dominant parties through the fractions in the legislature, three showed no provisions regarding how the policies and strategies of political parties in efforts to achieve gender equality and gender mainstreaming strategies not found in political parties. Third, strategies that are present in the party institutions only tangible Department of Women as women focal point. Beyond that, the strategy of increasing the representation of women is based on justice, equality, and gender equity was absent.

Keywords: gender mainstreaming strategy, politics interest, political parties, representation of women.

Analisis tentang strategi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi Pemilu. Pertama, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. Kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender, dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik. Ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. Di luar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen.

Kata kunci: kepentingan politik, strategi pengarusutamaan gender, partai politik, representasi perempuan.

Aditya Perdana. Faculty of Economics & Social Science Univ Hamburg dan FISIP Univ Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik

Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 117-127, 3 tabel, 19 daftar pustaka.

This article describes how seven female activists from civil organizations participate in 2004 and 2009 elections. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article unearths women's representation movement based on the actors' experiences to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that women activists, who participated in two elections, have contributed to implement women's representation into their political parties and parliament.

Keywords: female activists, legislative, party, region.

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak Pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterwakilan perempuan berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di partai politik mereka dan parlemen.

Kata kunci: aktivis perempuan, legislatif, partai, daerah pemilihan.

Nuri Soeseno. Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif

Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 129-143, 3 tabel, 21 daftar pustaka.

Women's representation in parties and legislative institution is closely related to Indonesian's party typology as office seekers. It charted descriptive mandate to fulfill 30% quote of women's representation in General Election 2014—not necessary representing women's critical agenda. The phenomena of female legislators working previously as celebrities, actress, singers, or coming from political dynasty is the consequence of office seekers parties. It does not then guarantee the promotion, empowerment and protection of women's critical issues in societies as they are not representing women in general substantively. It is necessary to create female critical actors coming to office in political parties to succeed feminist agenda.

Keywords: female politician, party, general election, descriptive and substantive representation.

Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office seekers'. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif: untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam Pemilu 2014. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik, dll merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga-lembaga politik (partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif.

Kata kunci: perempuan politisi, partai, pemilu, keterwakilan deskriptif dan substantif.

Any Sundari. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta. Jl. Jambon 4 No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241

Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta

Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 145-151, 1 gambar, 5 daftar pustaka.

Women's participation in politics is a crucial discourse in Indonesia. Affirmative action policy by providing 30% quota for women in parliament is a positive thing enforcing women to enter into political contestation. However, encouraging women to engage in politics is not easy task. Politics from the outset has been identified as a distinctive world of men and women experienced constant domestication systematically orchestrated by the state. *Ibuisism* ideology caused women to experience a variety of vulnerabilities and bundle of violences in formal politics. To revive women politically especially at the community level, women can learn to negotiate outside of formal politics to voice their representation.

Keywords: female politics, participation, community.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan diskursus penting di Indonesia. Kebijakan afirmatif kuota 30% kepada perempuan di parlemen merupakan hal positif guna mendorong perempuan berkontestasi. Namun, mendorong perempuan untuk berpolitik bukanlah perkara mudah. Politik sejak awal sudah diidentikkan sebagai dunia yang laki-laki dan negara secara sistematis melakukan domestifikasi perempuan dalam rumah. Ideologi *ibuisme* ini membawa perempuan mengalami berbagai kerentanan kekerasan dan menumpulkan potensi perempuan untuk berpolitik. Karena hal ini maka dibutuhkan kerja-kerja pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi dan berpolitik di luar politik formal parlemen.

Kata kunci: politik perempuan, partisipasi, komunitas.

Elisabeth Anita Dhewy Haryono. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?

How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 153-160., 1 gambar, 2 tabel, 4 daftar pustaka

The decreasing number of votes for female legislative candidates for DPR RI in 2014 General Election aroused an urgent question related to the commitment of political parties to encourage female representatives in the parliament. The 2014 Election result showed that, so far, political parties only adopted the affirmative policy in the level of legal-formal. Practically, even though they had implemented the minimum quota of female representation in the candidacy, this policy was not followed up by the internal policy in the political party to earnestly support the quota for female representation. Therefore, the internal political party transformation was needed and was urgent to be done, both for its structural and cultural level.

Keywords: Female parliament, candidate, 2014 general election

Menurunnya jumlah kandidat legislatif perempuan di DPR RI 2014 pada Pemilu membutuhkan perhatian dan komitmen dari partai politik agar meningkatkan keterwakilannya. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Secara praktik meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan, tetapi tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik yang mendukung kepemimpinan perempuan. Dus, transformasi kebijakan dalam internal partai politik dibutuhkan untuk perubahan budaya dan struktural yang lebih ramah gender.

Kata kunci: perempuan parlemen, caleg, Pemilu 2014

Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?

How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

Redaksi Jurnal Perempuan
Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960
Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

anita@jurnalperempuan.com

Naskah Diterima 29 Januari 2014. Direvisi 24 Februari 2014. Disetujui: 5 April 2014

Abstract

The decreasing number of votes for female legislative candidates for DPR RI in 2014 General Election aroused an urgent question related to the commitment of political parties to encourage female representatives in the parliament. The 2014 Election result showed that, so far, political parties only adopted the affirmative policy in the level of legal-formal. Practically, even though they had implemented the minimum quota of female representation in the candidacy, this policy was not followed up by the internal policy in the political party to earnestly support the quota for female representation. Therefore, the internal political party transformation was needed and was urgent to be done, both for its structural and cultural level.

Keywords: Female parliament, candidate, 2014 general election

Abstrak

Menurunnya jumlah kandidat legislatif perempuan di DPR RI 2014 pada Pemilu membutuhkan perhatian dan komitmen dari partai politik agar meningkatkan keterwakilannya. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Secara praktik meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan, tetapi tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik yang mendukung kepemimpinan perempuan. Dus, transformasi kebijakan dalam internal partai politik dibutuhkan untuk perubahan budaya dan struktural yang lebih ramah gender.

Kata kunci: perempuan parlemen, caleg, Pemilu 2014

Pendahuluan

Pada tiga pemilu terakhir sesudah reformasi, kebijakan *affirmative action* dengan penerapan sistem kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan telah dijalankan. Pada Pemilu 2004 tindak afirmasi dilakukan melalui penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut dalam pemilu. Hasilnya sebanyak 61 perempuan (11,09%) masuk sebagai anggota dewan dari total 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sementara pada pemilu 2009, diterapkan aturan kuota dan *zipper system* yang menghasilkan 101 perempuan (17,86%) anggota DPR dari 560 total anggota DPR RI. Untuk pemilu 2014 ini tetap berlaku aturan yang sama, sistem kuota dengan *zipper system*. Tabel 1 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan afirmasi dalam UU Pemilu.

Tabel 1. Kebijakan Afirmasi dalam UU Pemilu

| UU No.12/2003 | UU No. 10/2008 | UU No.8/2012 |
|--|--|--|
| Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30% | Minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat | Minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat |
| | Daftar bakal calon memuat minimal 30% keterwakilan perempuan | Daftar bakal calon memuat minimal 30% keterwakilan perempuan |
| | Dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan | Dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan |

Sumber: diolah dari UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012

Keberadaan produk hukum ini memang berhasil mendongkrak jumlah anggota legislatif (aleg) perempuan, bahkan jumlah aleg perempuan periode 2009-2014 adalah yang tertinggi dari pemilu yang pernah ada, meskipun jumlah tersebut sebenarnya masih jauh dari angka *critical mass* 30 persen. Di sisi lain tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini menjadi salah satu hambatan pelaksanaan kebijakan afirmasi. Karena itu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 Maret 2014 untuk mengabulkan permohonan uji materi UU No.8 Tahun 2012 tentang pemilu pada Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan pada pasal 215 huruf b menjadi semacam jaminan atau payung hukum etis bagi keterwakilan perempuan.

Dalam putusannya MK menyatakan terhadap frasa 'atau' dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 haruslah dimaknai kumulatif-alternatif menjadi 'dan/atau', artinya dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon, bisa terdapat 1 (satu), atau 2 (dua), bahkan tiga-tiganya perempuan bakal calon. Sedangkan pada frasa 'mempertimbangkan' dalam Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif, Mahkamah berpendapat haruslah dimaknai 'mengutamakan' calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan dalam satu daerah pemilihan (Dapil) memiliki luas yang sama. Sayangnya proses uji materi ini memakan waktu yang berkepanjangan, lebih dari satu tahun sejak diajukan pada 30 Januari 2013, sehingga banyak proses penetapan peserta pemilu dan penetapan daftar calon pemilu terlewat.

Keputusan ini memang baru berlaku ke depan dan tidak berlaku untuk susunan daftar caleg dalam pemilu yang digelar 9 April lalu, namun yang pasti keputusan MK ini mengikat banyak pihak termasuk partai politik (parpol) yang berperan sangat besar terhadap pencalonan dan keterpilihan perempuan. Direktur Eksekutif Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik yang juga menjadi juru bicara Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi sebagai pemohon uji materi Titi Sumbung¹ mengatakan partai politik wajib mempunyai kriteria yang jelas, transparan, dan objektif dalam merekrut calegnya. Sehingga ke depan proses rekrutmen caleg bukan sekadar berorientasi pada jumlah, melainkan jumlah dan kualitas. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memfasilitasi pelatihan dan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik dan kepemimpinan, dan sebagainya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati² mengatakan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah ada aturan yang sejalan yang mendukung keterwakilan perempuan. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, akan lebih menguatkan peraturan yang dibuat KPU terkait sengketa hasil pemilu. Sebelum ada uji materi ini, KPU sempat diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika mengutamakan calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Tentang maksud 'mengutamakan' calon perempuan dicontohkan jika caleg perempuan dan laki-laki memperoleh jumlah suara yang sama di DPR, maka dilihat persebarannya di wilayah kabupaten/kota. Jika keduanya mendapat suara yang sama di lima kabupaten/kota misalnya, maka tanpa perlu melihat bagaimana persebaran suaranya di tingkat kecamatan, kursi akan diutamakan pada caleg perempuan sebagai calon terpilih. Tetapi jika keduanya caleg laki-laki, maka harus dilihat persebaran perolehan suaranya mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Hal ini merupakan bentuk perlakuan berbeda yang dilakukan demi kesetaraan gender dan kebutuhan mengontrol perilaku dalam berpolitik.

Bagaimana Sikap Partai pada Caleg Perempuan?

Partai politik memiliki peran cukup besar dalam hal pencalonan perempuan terkait dengan kebijakan internal parpol dalam proses seleksi pemilihan bakal calon (balon), misalnya bagaimana parpol menempatkan perempuan di dapil-dapil potensial atau sebaliknya di dapil-dapil yang tidak menjadi lumbung partai. Titi Sumbung, aktivis perempuan yang aktif terlibat dalam fraksi balkon untuk meloloskan ketentuan kuota 30 persen ini, memiliki pengalaman tersendiri terkait dengan peran parpol yang sangat besar. Ia mengungkapkan pada pemilu 2004 dirinya ditempatkan di dapil yang sama sekali tidak dia kenal dan masyarakat juga tidak mengenalnya. Tapi setelah ia terjun ke sana, suara yang ia peroleh lebih banyak daripada kandidat di atasnya yang berada di nomor urut dua. Tetapi karena di dapil tersebut partai yang mengusungnya cuma mendapat jatah dua kursi, sementara pada pemilu 2004 yang berlaku adalah sistem nomor urut, akhirnya hilanglah suara yang ia dapat dan kandidat nomor dua lah yang menjadi anggota dewan. Dan pada pemilu 2009 ia ditempatkan di dapil yang jauh lebih besar yang membuatnya berpikir ulang untuk kembali mencalonkan diri.

“Jadi waktu yang kedua kali, 2009, saya maju lagi karena didorong-dorong. Oke. Orang semua pada bilang, ganti dong partainya. *No*, aku mau *nguji*, sampai sejauh mana partai ini memahami tentang keterwakilan perempuan, segala macam itu ya. Tapi akhirnya saya dilempar kemana? Saya dilempar ke daerah yang lebih besar. Dan kemudian setelah UU-nya ngomong satu dari tiga mesti perempuan, akhirnya nomor tiga itu anak gubernur, dan saya ditaruh nomor lima... Waktu itu saya mengundurkan diri sebelum pemilu. Saya pikir percumalah, saya dilempar ke Jember yang cuma beberapa dapil saja sudah kayak begini, apalagi di Kalimantan Barat yang dapilnya lebih dari 10. Dan itu satu sen pun tidak ada uang dari partai, semua harus keluar sendiri”³.

Pengalaman yang dialami Titi Sumbung ini bisa jadi adalah juga pengalaman yang dialami oleh caleg-caleg lain. Ida Budhiati mengatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Meskipun terdapat peningkatan jumlah, namun tidak menjadi jaminan bahwa akan lebih banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Sejumlah kebijakan telah dilahirkan untuk mendorong parpol agar memberikan kekhususan sehingga kader perempuan dapat berbuat lebih banyak. Seperti yang dilakukan KPU melalui PKPU No.7 Tahun 2013 yang merupakan respons atas UU Pemilu. Pasal 24 PKPU misalnya mengatur tentang kewajiban pemenuhan kuota 30 persen untuk caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Begitu juga ketentuan yang mengatur tentang susunan nomor urut calon agar caleg perempuan tidak berada di urutan paling bawah.

Peraturan ini juga memuat sanksi, apabila tidak dijalankan oleh partai politik, maka parpol dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif. Terkait implementasi peraturan ini, ketegasan KPU perlu mendapat apresiasi. Seperti dilansir *kompas.com*⁴ pada pertengahan Juni lalu, KPU mengumumkan 4 partai yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar calegnya. Akibatnya, seluruh caleg di dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan tersebut dinyatakan gugur dan tidak bisa maju dalam pemilu.

Keempat partai tersebut adalah Partai Gerindra yang tidak memenuhi syarat di dapil Jawa Barat IX, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III, Partai Amanat Nasional (PAN) di dapil Sumatera Barat I, dan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang kuota caleg perempuannya kurang di dapil Jabar V dan VI serta Nusa Tenggara Timur I. Keberadaan sanksi ini menjadi sangat penting, parpol mau tidak mau harus memenuhi kuota caleg perempuan yang telah ditetapkan atau menerima sanksi KPU. Apabila sanksi ini berjalan dengan baik, maka kuota perempuan bukan tidak mungkin terpenuhi.

Upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lewat sejumlah peraturan seperti UU Pemilu dan PKPU tersebut ternyata membawa hasil. Jika merujuk pada Daftar Calon Tetap (DCT) partai peserta pemilu 2014, setiap parpol mampu memenuhi batas minimum keterwakilan perempuan seperti terlihat pada tabel 2 berikut.

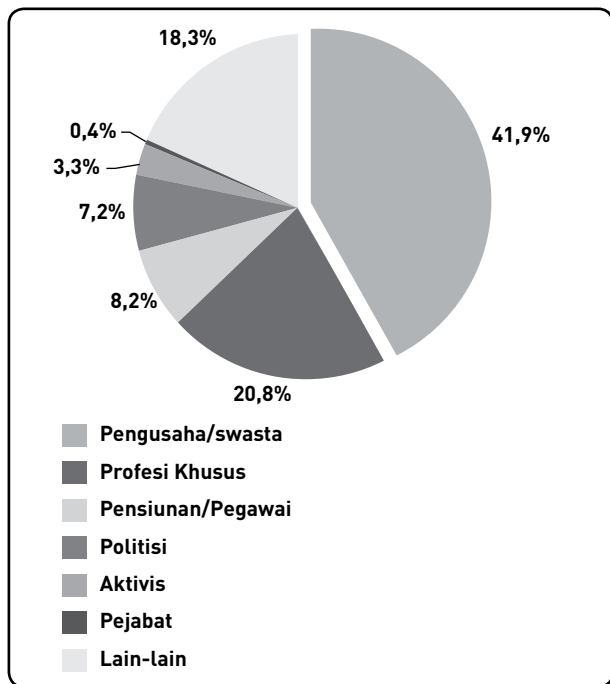
Tabel 2. DCT Partai Peserta Pemilu 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

| Partai | Laki-laki | Perempuan | Persen |
|----------|-----------|-----------|--------|
| Nasdem | 333 | 226 | 40,4% |
| PKB | 348 | 210 | 37,6% |
| PKS | 301 | 191 | 38,8% |
| PDIP | 360 | 200 | 35,7% |
| Golkar | 358 | 202 | 36,1% |
| Gerindra | 354 | 203 | 36,4% |
| Demokrat | 355 | 205 | 36,6% |
| PAN | 353 | 208 | 37,1% |
| PPP | 335 | 214 | 39% |
| Hanura | 355 | 203 | 36,4% |
| PBB | 351 | 205 | 36,9% |
| PKPI | 339 | 200 | 37,1% |

Sumber: KPI

Bagaimana Latar Belakang Caleg Perempuan di Pemilu 2014?

Lalu bagaimana komposisi caleg perempuan tersebut? Berdasarkan latar belakang pekerjaan mereka, sebagian besar berangkat dari kalangan pengusaha/swasta yakni sebanyak 1171 orang, diikuti oleh kelompok profesi khusus yang berjumlah 581 orang, yang meliputi dokter, advokat, agamawan, akademisi, dan artis. Deskripsi lebih lengkap dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1. Komposisi caleg menurut pekerjaan

Sumber: Formappi

Direktur Megawati Institute Musdah Mulia⁵ mengatakan mengacu pada hasil pemilu 2009 dimana 42% dari perempuan yang berada di Parlemen berasal dari dinasti politik, maka artinya partai-partai politik tidak melakukan apapun dalam pendidikan politik. Yang terjadi mereka asal merekrut entah istri, anak, keponakan atau saudara, yang penting perempuan. Dan jika melihat komposisi caleg pada pemilu 2014 ini, ia belum melihat ada perubahan signifikan.

“Kalau berdasarkan yang saya lihat, caleg-caleg yang sekarang ini masih sama saja, tidak ada yang berubah. Mungkin kalau dibuat pemetaan, ya pemetaannya nggak jauh-jauh beda dengan komposisi yang ada di parlemen kemarin, isinya ya dinasti politik seperti itu, mumpung saudara saya, yang penting perempuan”.

Dinasti politik ini menjadi persoalan tersendiri, karena mendasarkan diri pada hubungan kekeluargaan, maka aspek kemampuan dan kapasitas caleg, dalam konteks ini terutama kemampuan menyuarakan kepentingan gender, seringkali menjadi urutan kesekian. Selain itu dalam praktiknya juga cenderung rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Secara umum praktik dinasti politik yang ada tidak memberi dampak positif bagi konstituen atau masyarakat.

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Northwestern Jeffrey Winters⁶ yang memandang persoalan dinasti politik ini dari sudut pandang yang lebih optimis. Ia berangkat dari perspektif bahwa dunia ini sangat patriarkis, sehingga jalan bagi perempuan untuk bisa masuk dalam posisi-posisi strategis adalah lewat laki-laki. Menurutnya hal ini sah-sah saja dan ia melihatnya sebagai pola yang universal. Ada nama seperti Megawati Soekarnoputri, Benazir Bhutto, Gloria Macapagal Arroyo, Corozon Aquino, Indira Gandhi, Hillary Clinton dan lain sebagainya, yang ini semua lewat lelaki. Jadi langkah awal lewat laki-laki, selanjutnya harus disempurnakan. Menurutnya hal ini penting sebagai proses pembelajaran, agar generasi muda melihat bahwa perempuan bisa berada di posisi tersebut.

Selain dinasti politik, anggota legislatif perempuan juga berasal dari figur populer termasuk selebriti. Anggota parlemen 2009-2014 dari kelompok figur populer ini mencapai 25%. Pada pemilu 2014 ini figur-figur semacam ini juga masih ada. Musdah menilai keberadaan selebriti yang menjadi caleg merupakan jalan pintas yang dipilih partai mengingat para artis tersebut adalah sosok yang memiliki popularitas dan uang. Hal ini mengindikasikan ketidakmatangan partai politik. Terkait hal ini Atnike Nova Sigiuro dari Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) berpandangan bahwa partai politik kita belum menjadi partai modern, artinya tidak mempunyai sistem pendidikan kader yang baik. Di sisi lain, sistem demokrasi kita seperti tampak dalam pemilu legislatif, pemilukada, dan pemilu presiden, masih sangat mengandalkan cara seperti marketing produk dan bukan memasarkan program, bukan memasarkan visi.

“Tidak mengherankan jika partai politik akan lebih memilih Desi Ratnasari (artis, red) daripada Gadis Arivia (pendiri *Jurnal Perempuan*, red) untuk menjadi caleg. Meskipun Gadis pasti punya visi yang lebih baik tentang perempuan Indonesia daripada Desi Ratnasari. Jadi, demokrasi di Indonesia apalagi demokrasi elektoral, itu tidak ada bedanya dengan Indonesian Idol”⁷.

Keberadaan caleg perempuan dengan latar belakang dinasti politik dan dari kalangan selebriti ini lebih bertujuan pada pencapaian agenda parpol, yakni sebatas memenuhi syarat formal kuota

30 persen caleg perempuan dan sekadar untuk menaikkan perolehan suara, namun belum sungguh-sungguh memerhatikan kebutuhan perempuan.

Bagaimana Sikap Masyarakat pada Caleg Perempuan?

Di sisi lain masyarakat juga menunjukkan kecenderungan masih menggunakan standar ganda dalam menilai perempuan dan laki-laki. Meskipun faktanya tidak sedikit caleg laki-laki yang memiliki kapasitas dan rekam jejak buruk, namun cercaan dan sikap menghakimi lebih sering dan lebih mudah ditujukan pada caleg perempuan yang tidak kapabel dibandingkan pada caleg laki-laki. Seperti diungkapkan Atnike, penilaian terhadap caleg perempuan tidak diarahkan pada visi politiknya atau program politiknya tetapi lebih mengarah pada tubuh perempuannya yang menjadi sasaran.

“Lebih mudah publik melecehkan caleg perempuan yang tidak kompeten daripada caleg laki-laki yang tidak kompeten. Saya juga *nggak* suka Desi Ratnasari jadi caleg atau misalnya siapa itu yang PPP, Angel Lelga. Tapi juga menurut saya ada semacam *machoisme* atau apa ya... Di kalangan laki-laki yang sebetulnya gagasannya agak maju, punya pemahaman tentang perempuan dan laki-laki dan demokrasi yang lebih maju, dia bisa dengan mudah melecehkan. Misalnya ada gambar di *facebook*, ada Rhoma Irama, ada Angel Lelga, gambar Angel Lelga ada *quote*-nya ‘coblos saya’, lalu Rhoma Irama, ‘saya sudah pernah’... Saya *nggak* suka Angel Lelga, menurut saya dia orang yang *nggak* pantas untuk jadi caleg, tapi itu juga menunjukkan publik lebih suka men-*judge* perempuan daripada laki-laki”.

Sikap semacam ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi media juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Media cenderung menampilkan perempuan secara dikotomis, sebagai yang pintar di satu sisi dan yang paling bodoh di sisi lain. Selain itu, media juga lebih memilih isu yang *eye-catching* dalam pandangan mereka dan justru mengabaikan isu yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, seperti disampaikan Sekretaris Departemen Luar Negeri Partai Demokrat Imelda Sari.

“...ada beberapa teman artis yang mereka juga baru masuk di dalam politik, itu memang *nggak* punya latar belakang dan dia juga *nggak* pernah mengalami pendidikan atau pemberdayaan bagaimana seorang caleg dan seterusnya. Begitu dia ngomong, dia ngomong dengan cara dia, dan apa yang kita lihat, di ruang publik menjadi bulan-bulanan dan di-*bully* habis di *twitter*, dimana-mana...media itu kalau isunya politik dan dia merasa itu *eye-catching* buat publik baru dia akan ambil suara kaum perempuan. Tapi begitu kita ngomong tentang ini *nih* ada simpan pinjam buat perempuan, *nggak* menarik. Padahal itu buat kaum perempuan di pedesaan, di gang-gang yang saya lakoni di Bogor misalnya...itu sangat-sangat berharga”⁸.

Bisa dikatakan persoalan standar ganda ini berlaku terhadap perempuan di setiap jenjang, tidak hanya ketika dia sedang dalam proses berjuang untuk masuk parlemen, artinya menjadi caleg, tetapi juga ketika mereka sudah menduduki posisi tertentu, entah anggota legislatif, bagian dari struktur eksekutif, dan lain-lain. Seperti diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu bahwa dalam bidang apapun perempuan harus selalu membuktikan lebih daripada laki-laki. Ada standar yang berlaku berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dalam situasi semacam ini mau tidak mau perempuan harus menyesuaikan diri. Karena itu menurut Mari penting bagi perempuan untuk memiliki kepercayaan diri. Dan berangkat dari pengalamannya, maka menjadi *role model* dan berorientasi pada hasil merupakan cara yang lebih bisa diterima.

“Jadi dalam pengalaman saya dalam berbagai kapasitas, *sometimes* sebagai *the only woman there*, kita ternyata harus membuktikan lebih daripada laki-laki. Itu mungkin kenyataan ya, dan kita *nggak* bisa *fight*. Mau *nggak* mau kita harus bisa menyesuaikan diri dalam keadaan seperti itu. Dan kalau kita dalam posisi seperti ini, kita harus menjadi *role model*. Jadi sewaktu saya dipilih menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I), saya sebenarnya *ngeri* karena saya merasa saya tidak boleh gagal, saya harus berhasil untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Dan saya minoritasnya lebih dari satu *gitu* kan. Itu menjadi suatu tantangan tapi juga menjadi suatu *pressure*. *That means* kita harus bisa menyesuaikan

diri didalam *decision making*...saya akhirnya *outcome oriented* saja. Saya ingin mendapat suatu perubahan kebijakan, kalau saya *ngotot* di dalam rapat begini-begini, saya perhatikan, saya tidak pernah berhasil, 'ini perempuan rewel, cerewet, *ngotot* mulu' gitu ya, didengerin, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ya kita harus cari cara lain, antara lain ya dengan *pursuit normally the other male cabinet members* untuk melihat *value* daripada perubahan kebijakan itu. Jadi menurut saya cara kita menyampaikan itu pada akhirnya menjadi intinya... Akhirnya saya hanya bisa *win my argument*, kalau saya bisa menunjukkan ini *benefit-nya*"⁹.

Bagaimana Politik Uang dalam Pemilu?

Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah *money politic*. Mudah menilai persoalan ini terkait dengan absennya partai politik dalam proses pendidikan politik terhadap masyarakat. Sehingga kerap kali kita menjumpai pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bermasalah dan setiap masalah tersebut ujungnya adalah masalah uang. Chusnul Mar'iyah¹⁰, Presiden Direktur *Center for Election and Political Party University Link* (CEPP Uni Link) menceritakan pengalamannya tentang bagaimana sulitnya mengubah persepsi mengenai *money politic*. Ketika memberikan pendidikan untuk caleg-caleg perempuan se-provinsi Riau, setelah sekitar 4 jam ia menyampaikan materi terkait bagaimana caleg bisa tampil dan menang, dan peserta sudah tampak optimis, tiba-tiba menjelang akhir seorang peserta mengajukan satu pertanyaan yang intinya menyanggah bahwa caleg bisa menang tanpa *money politic*, serangan fajar, dan sejenisnya. Sementara Erika¹¹ dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpandangan bahwa kultur partai dan sikap pragmatis masyarakat ikut menyuburkan praktik *money politic*. Ia melihat partai politik masih didominasi kaum laki-laki yang orientasinya terhadap kepentingan-kepentingan perempuan masih kurang dan beranggapan bahwa uang merupakan kekuatan yang sangat besar. Pada saat pemilukada di DKI Jakarta, ia melihat sendiri bagaimana masyarakat tanpa sungkan meminta uang langsung kepada kandidat. Sementara di Jawa Barat masyarakat tidak meminta uang melainkan beras karena itu kebutuhan utama untuk mereka.

Pertanyaannya kemudian sudah sedemikian pragmatiskah masyarakat? Bila melihat pada hasil

pemilu 9 April lalu, sayangnya kemungkinan iya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari seperti dikutip viva.co.id¹² mengaku peluangnya untuk kembali lolos menjadi anggota dewan sangat kecil meskipun ia sudah turun ke dapilnya (Jawa Timur VI) sejak 6 bulan sebelum pemilu dan bertemu langsung dengan calon pemilihnya untuk mengampanyekan programnya dan mendengarkan aspirasi mereka. Selama berkeliling Eva mengaku memang dimintai uang transportasi oleh calon pemilih, tetapi ia menegosiasi supaya uang tersebut diganti menjadi sumbangan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ia menduga hilangnya peluang suaranya dikarenakan serangan fajar. Namun menurutnya sistem lah yang membuat perilaku peserta pemilu dan pemilih seperti itu. Pemilu 2014 mematok dua syarat utama, populer dan punya uang, sama seperti pemilu 2009.

Sementara terkait aspek popularitas caleg, apakah popularitas ini menjadi jaminan bagi peningkatan suara partai? Ternyata tidak juga, seperti pengakuan PPP yang mengusung caleg berlatarbelakang artis pada pemilu legislatif 9 April kemarin, mengingat perolehan suara partai berlambang ka'bah tersebut berdasarkan hitung cepat hanya berada di kisaran 7 persen. Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Emron Pangkapi seperti dilansir www.kabar3.com¹³ mengatakan Angel Lelga yang ditempatkan di dapil Jawa Tengah V ternyata tidak bisa mendongkrak suara PPP. Bahkan caleg yang nomor dua justru mendapat suara lebih banyak. Hal yang sama juga terjadi pada perolehan suara Nasrullah atau yang lebih dikenal luas sebagai Mat Solar di daerah pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Dari kalangan artis yang perolehan suaranya lebih baik adalah Okky Asokawati, bahkan diperkirakan lolos ke parlemen. Okky adalah anggota legislatif dari PPP pada periode 2009-2014. Menurut Emron ini merupakan pelajaran bagi partainya untuk menyiapkan caleg-caleg yang lebih bagus, berkompeten dan mengakar di masyarakat pada pemilu 2019 nanti.

Penutup

Pertanyaan selanjutnya apa yang harus kita lakukan, apa strategi yang perlu kita bangun bersama agar kepentingan dan agenda politik perempuan dapat terrealisasi? agar politisi perempuan mampu

berperan menyuarakan kepentingan perempuan? Titi Sumbang berpandangan setidaknya ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yakni sumber daya manusia (SDM), nilai budaya, dan manajemen pembangunan. Pertama, terkait aspek SDM, Titi berpendapat kita perlu untuk melibatkan laki-laki, mengubah *mindset* mereka yang masih patriarkal untuk memahami bahwa kesetaraan adalah persoalan hak asasi manusia dan perempuan adalah juga manusia. Kedua, di samping SDM, nilai budaya yang tidak simpatik pada perempuan juga perlu diubah. Dan yang ketiga soal manajemen, manajemen pembangunan, jadi siapa sebenarnya yang menentukan anggaran, siapa yang sebenarnya merencanakan? Titi mengkritisi soal manajemen pembangunan yang sejauh ini masih bersifat *top-down*, dari atas ke bawah, seharusnya *bottom-up*. Oleh karena itu menurutnya sistem manajemen harus dimulai dengan menggerakkan manajemen perencanaan, sistem perencanaan, mulai dari identifikasi masalah, itu sudah harus dibiasakan, di situlah perempuan bisa masuk di situ, sehingga *civil society* juga mengerti mengenai gender, dsb. Sehingga ia bersama lembaganya, pusat pemberdayaan perempuan sekarang sedang menangani program manajemen masuk desa, artinya bagaimana *civil society* bisa berpartisipasi dalam sistem ini, yaitu mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sementara Chusnul melihat gerakan pendidikan menjadi strategi dasar, bentuknya bisa macam-macam yang mengarah pada pemberdayaan partai politik. Selain itu perlu juga mendorong formulasi kebijakan yang memerhatikan aspek gender, relasi gender yang ada dan fihak kekuasaan. Ini kemudian kita rumuskan bersama menjadi *masterplan* pembangunan yang bicara tentang *gender policy* dengan isu sosial sebagai pusat dan kita tawarkan ke semua partai politik dan calon-calon presiden.

Di sisi lain Mari Pangestu berpendapat bahwa strategi gerakan perempuan hendaknya tidak masuk melalui isu perempuan, tetapi melalui isu ekonomi atau apa yang disebutnya sebagai '*what's the economic benefit from whatever it is*'. Banyak sekali studi yang sudah dilakukan yang membuktikan kalau pintu masuknya dari segi ekonomi ataupun dari segi kebijakan, karena kebutuhan perempuan dan laki-laki memang berbeda. Menurutnya, salah satu pintu masuk yang efektif adalah ekonomi. Jika kita bisa menunjukkan bahwa dengan melakukan A, B, C, D,

E, maka dampak ekonominya seperti ini, atau dengan kata lain, jika kita melakukan ini sebetulnya *economic benefit*-nya besar, maka dia akan melihat ini bukan hanya masalah perempuan, tetapi ini adalah sesuatu tujuan yang lebih besar dan penting, mungkin kesetaraan, equality, keadilan. Hal lain menurut Mari kita harus fokus pada prioritas. Kita perlu menyepakati dua tiga isu prioritas yang dikemas secara sederhana dengan contoh-contoh yang riil, karena targetnya mereka yang memilih, bukan yang dipilih, kita ingin memengaruhi yang memilih. Kalau itu sesuatu yang menyentuh yang memilih dan kita bisa meyakinkan kepada yang sedang mencoba untuk dipilih, kalau anda tidak meng-*address* isu ini, anda tidak akan terpilih. Dan kalau anda sudah terpilih, mereka akan menagih, mereka akan merongrong dengan apakah itu *civil society* atau media. Jika secara konsisten kita melakukan ini, mungkin kita memiliki kesempatan untuk membuat perubahan.

Sementara Jeffrey Winters menawarkan strategi konseptual radical equality. Menurutnya, tantangan yang paling besar dalam isu *gender equality* adalah bagaimana kita bisa mencari ideologi atau pendekatan yang baru. Di satu sisi kita melihat ada pluralisme di dunia ini, pluralisme kebudayaan, pluralisme di negara yang berbeda-beda, tetapi kita juga harus mencari di dalam pluralisme tersebut, ada juga universalisme yang harus diangkat, yang mana yang universal yang mana yang plural. Jadi saya kira ideologi yang paling berlaku untuk abad XXI adalah *difference* boleh, *difference is good, but certain differences are unacceptable*. Misalnya contoh yang sederhana, kalau perempuan tidak boleh keluar dari rumah diatas jam tertentu atau tidak boleh bekerja, lelaki juga tidak boleh keluar dari rumah pada jam yang sama. Nah itu berarti negara ini boleh punya peraturan dimana orang *nggak* boleh keluar dari rumah di atas jam tertentu. Itu variasi, tetapi di dalam variasi itu ada *radical equality*. Itu semacam konsep *radical equality* dimana ada variasi di dalam dunia, tetapi di dalam variasi itu ada *radical equality* diantara gender. Nah saya kira konsep ini agak frontal dan membuat lelaki kaget dan itu perlu. Yang tidak bisa diterima di dunia yang pluralis adalah *inequality between groups within a culture*, itu *unacceptable*. Kalau mau *cutting the genital of the woman, cut the genital of the man in the same way*, saya baru bisa menerima itu dan membiarkannya. *But only woman, no*. Yang ingin saya katakan di sini, *we must find universalism which is embracing pluralism*,

in a way yang laku di seluruh dunia. Jadi we must be able to embrace pluralism while fighting inequality.

Catatan Belakang

- 1 Konferensi pers Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi, Hotel Akmani Jakarta, 18 Maret 2014
- 2 Konferensi pers Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi, Hotel Akmani Jakarta, 18 Maret 2014
- 3 Focus Group Discussion (FGD), kantor YJP, 8 Maret 2014
- 4 <http://nasional.kompas.com/read/2013/06/10/1726595/Tak.Penuhi.Keterwakilan.Perempuan..4.Parpol.Gugur> diakses 1 April 2014
- 5 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014
- 6 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014
- 7 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014
- 8 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014
- 9 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014

10 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014

11 Focus Group Discussion, kantor YJP, 8 Maret 2014

12 <http://us.m.news.viva.co.id/news/read/497491-habis-rp1-5-miliar--eva-sundari-gagal-kembali-ke-senayan> diakses 17 April 2014

13 <http://www.kabar3.com/news/2014/04/ppp-akui-caleg-artis-gagal-dongkrak-suara-partai> diakses 17 April 2014

Daftar Pustaka

Konferensi pers Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi, Hotel Akmani Jakarta, 18 Maret 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2013/06/10/1726595/Tak.Penuhi.Keterwakilan.Perempuan..4.Parpol.Gugur>. (diakses 1 April 2014)

<http://us.m.news.viva.co.id/news/read/497491-habis-rp1-5-miliar--eva-sundari-gagal-kembali-ke-senayan>. (diakses 17 April 2014)

<http://www.kabar3.com/news/2014/04/ppp-akui-caleg-artis-gagal-dongkrak-suara-partai>. (diakses 17 April 2014)

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

| | |
|---|---------|
| Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi" | iii-iv |
| Artikel / Articles | |
| • Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i> | 81-91 |
| <i>Baiq L.S.W. Wardhani</i> | |
| • Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i> | 93-101 |
| <i>Partini</i> | |
| • Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i> | 103-115 |
| <i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i> | |
| • Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i> | 117-127 |
| <i>Aditya Perdana</i> | |
| • Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i> | 129-143 |
| <i>Nuri Soeseno</i> | |
| • Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i> | 145-151 |
| <i>Any Sundari</i> | |
| • Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i> | 153-160 |
| <i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i> | |
| Wawancara / Interview | |
| • Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i> | 161-164 |
| <i>Dewi Candraningrum</i> | |
| Kata dan Makna / Words and Meanings | 165-166 |
| Profil / Profile | |
| • Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja? | 167-170 |
| <i>Mariana Amiruddin</i> | |
| Resensi Buku/ Book Review | |
| • Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i> | 171-173 |
| <i>Astuti Parengkuh</i> | |

